



▶ TRANSPORTASI ONLINE

Maxride Harus Segera Urus Izin

DANUREJAN—Dinas Perhubungan (Dishub) DIY kembali mengingatkan soal perizinan Maxride, moda transportasi bajaj berbasis aplikasi *online* yang sudah beroperasi di DIY. Sementara, Dishub Kota Jogja menerbitkan surat edaran pelarangan Maxride lantaran tidak berizin.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menjelaskan sampai saat ini Maxride belum mengurus perizinan. "Semestinya kalau belum ada izin akan dilakukan penertiban," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9).

Angkutan penumpang umum untuk roda tiga hanya bisa di jalan

▶ Dishub DIY sudah mengingatkan aplikator untuk mengurus perizinan sejak awal beroperasi beberapa bulan lalu.

▶ Dishub Kota Jogja sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan pelarangan Maxride lantaran tidak berizin.

lingkungan. Maxride juga semestinya menggunakan pelat nomor kuning. "Harusnya berpelat kuning kalau di jalan lokal. Tapi yang ada saat ini masih pelat putih atau hitam milik perusahaan itu sendiri," katanya.

Dinas Perhubungan DIY sudah mengingatkan aplikator untuk mengurus perizinan sejak awal beroperasi beberapa bulan lalu. Namun, sampai saat ini peringatan itu tidak diindahkan sehingga sampai sekarang belum berizin.

Selain itu, Maxride malah terus

menambah jumlah armada yang beroperasi di jalanan DIY. "Kalau provinsi prinsipnya berkoordinasi, mengingatkan dan berkomunikasi. Tapi sampai sekarang unit kendaraan malah bertambah banyak, itu yang disayangkan," katanya.

Banyaknya armada yang beroperasi namun belum ada penataan ini membuat lalu lintas semakin padat dan menambah persaingan angkutan berbasis aplikasi *online*. "Kami tidak ingin lagi menimbulkan persaingan usaha karena sudah ada ojol dan lainnya. Ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari kalau tidak segera disikapi dari sekarang," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menuturkan untuk Maxride yang sifatnya tidak hanya beroperasi di perkotaan saja tapi juga di wilayah Sleman dan Bantul, maka kebijakan perizinan dan penertiban menjadi kewenangan Dishub DIY.

"Kemarin dalam rapat di tingkat provinsi dinyatakan bahwa Maxride tidak boleh beroperasi," katanya.

Dishub Kota Jogja sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan pelarangan Maxride lantaran tidak berizin. Meski demikian, untuk penertiban tetap menunggu instruksi dari Dishub DIY. "Cara bertindaknya harus jelas, harus satu kesatuan di kabupaten dan kota di DIY. Tinggal nanti kalau mau operasi bareng, akan kami siapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Digital Marketing Manager Maxauto Indonesia, Azhari Amri menyatakan soal perizinan Maxride, perusahaannya telah mengantongi perizinan, aplikasi juga telah mengantongi perizinan dan secara kendaraan pun sudah memiliki perizinan hingga uji emisi. "Untuk sosialisasi teman-teman tim di Jogja sudah melakukan dengan beberapa komunitas," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005